ISSN:3031-3422
Sumenep, 5-6 Desember 2023

ANALISIS TINDAK PIDANA TERHADAP KERUSAKAN PROGRAM DAN DATA KOMPUTER (Studi kasus perlindungan sistem hukum informatika)

Nurul Maghfirah[1], Abshoril Fithry[2*]
[1,2]*Universitas Wiraraja, Madura*

abshorilfithry@wiraraja.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah membawa pada pemikiran sosial, sikap dan gaya hidup, termasuk pada pola perilaku manusia, tidak terbatas pada penegakan hukum, hubungan budaya,ekonomi dan sosial. Kerahasiaan data pribadi penting karenahal tersebut berkaitan dengan harga diri dan kebebasan berekspresi.Sejauh ini, belum ada regulasi khusus untuk memerangi penyalahgunaan data pribadi yang menimbulkan persoalan hukum atas data pribadi oleh negara.Terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana kejahatan kasus pencurian data. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kebijakan perlindungan hukum terhadap kejahatan pencurian pada data pribadi di internet dan apa saja faktor yang dapat menyebabkan tindak pidana kejahatan pencurian data pribadi di internet. Studi kasus ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana hukum berlaku terhadap pelanggaran terhadap program dan data komputer, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalammenegakkan hukum dalam kasus-kasus ini. Penelitian ini akan memberikan wawasan yang berguna tentang upaya perlindungan system hukum terhadap ancaman terhadap komputasi danteknologiinformasi. Artikel ini memakai metode penelitian normatif yang dilakukan dengan cara mengamati bahan pustaka seperti bahan hukum, seperti jurnal, konsep, skripsi, teori, prinsip,sertanorma hokum yangsaatini berlaku di Indonesia.

Kata kunci :Datapribadi, PerlindunganHukum,Internet.

ABSTRACT

The development of information and communication technology has brought about social thinking, attitudes and lifestyles, including patterns of human behavior, not limited to law enforcement, cultural, economic and social relations. Confidentiality of personal data is important because it relates to self-respect and freedom of expression. So far, there are no specific regulations to combat misuse of personal data which gives rise to legal issues regarding personal data by the state. There are several factors that encourage criminal acts of data theft. Thus, this research aims to provide an understanding of legal protection policies against crimes of theft of personal data on the internet and what factors can lead to criminal acts of theft of personal data on the internet. This case study aims to investigate how the law applies to violations of computer programs and data, as well as identify possible obstacles to enforcing the law in these cases. This research will provide useful insight into efforts to protect the legal system against threats to computing and information technology. This article uses a normative research method which is carried out by observing library materials such as legal materials, such as journals, concepts, theses, theories, principles and legal norms that currently apply in Indonesia.

Keywords :Personaldata, LegalProtection,Internet.

PENDAHULUAN

Seiring pada perkembangan zaman, kemajuan teknologi informasi semakin berkembang dengan pesat sehingga masyarakat di Indonesia dapat lebih mudah memperoleh informasi yang mereka inginkan. Dimana semua akses dibuat mudah dengan adanya teknologi yang serba memudahkan untuk mengakses informasi. Dengan perkembangan media elektronik dan komunikasi, dimana waktu dan jarak bukan kembali menjadi permasalahan utama kepada semua individu karena, semua mudah untuk di jangkau termasuk dalam pemerintah. Setiap individu dapat berkomunikasi satu sama lain tanpa bertemu di ruang fisik dengan menggunakan media yang tersedia. Kemajuan teknologi informasi sudah dianggap menjadi kekuatan yang bisa menentukan nasib seseorang dengan menggunakan teknologi informasi dapat menjadi sebuah keuntungan yang perlu diatasi. Oleh karena itu dapat menyebabkan masyarakat Indonesia sangat bergantungan dengan teknologi informasi sehingga semakin banyak pula resiko timbulnya tindak kejahatan.

Teknologi informasi dapat meningkatkan kemajuan dalam pandangan hidup manusia, namun juga bisa sebagai sarana melakukan tindak kriminal hukum yang dikenal sebagai “cybercrime”. Kondisi tersebut saat ini menjadi lebih terhubung oleh Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) daripada sebelumnya dikarenakan sistem telekomunikasi dan komputer dapat terhubung secara global/have global reach serta mendunia. Seiring berjalannya waktu dengan perkembangan IPTEK, muncul suatu kejahatan siber yang dikenal dengan istilah cyber terorism.”Cyber “terrorism kadang juga disebut dengan cyber sabotage and exortion.Kejahatan ini dilakukan dengan membuat sebuah gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung ke internet.

Saat ini cyber terrorism telah menjadi isu besar di setiap negara (Sarinastiti & Vardhani, 2018; Ufran, 2014).Oleh karena itu, perlu dilakukan dengan segera sebuah tindakan cepat sebagai antisipasi berupa pembaharuan hukum pidana atau kebijakan hukum pidana oleh pembuat undang-undang.Kebijakan hukum pidana dalam tujuannya untuk menegakkan hukum dan menanggulangi tindak pidana cyber terrorism pada tulisan ini terbatas pada aspek perumusan tindak pidana dari segi materiil berupa bagaimana perumusan suatu delik (Aryo Wijoseno et al., 2023)

Jadi kebijakan “atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal.Di lihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan.Kejahatan “baru ini sangat berdampak pada dunia usaha.Banyak yang menganggap bahwa keberadaan KUHP tidak mampu menjangkau kejahatan baru tersebut, sehingga pemerintah menginisiasi lahirnya aturan tentang cyber crime.Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan baagaimana pengaturan tindak pidana terorisme yang dilakukan melalui dunia maya (cyber terrorism) dalam hukum positif di Indonesia (Megasari Br Nababan et al., 2023)

METODE PENELITIAN

Metode “penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode yuridis normatif dengan studi literatur.Studi literatur meneliti data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.Penelitian ini menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada dengan mengkaji berdasarkan teori-teori hukum yang dikaitkan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam praktek hukum. Penelitian ini diawali dengan adanya suatu persoalan dalam norma hukum, yakni adanya kekosongan hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan yang hendak diteliti.

Sumber data penelitian ini adalah Uundang-Undang yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan terorisme dan kajian-kajian sebelumnya tentang terorisme, dan pendapat para ahli hukum.Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode kajian pustaka.Data yang tekumpul dianalisis menggunakan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak kejahatan dan perbuatan tercela merupakan perilaku yang melanggar hokum dan norma sosial, dan masyarakat tidakmenerimanya.Tindak kejahatan sering kali disebabkan oleh berbagai banyak faktor.Faktor pemicu terjadinya tindak kejahatan adalah faktor biologis yang terdiri dari faktor ekonomi (tidak adanya lapangan pekerjaan), faktor mental atau fisik, dan factor pribadi, factor sosial, dan masih banyak factor lainnya sebagai pemicu berbagai macam jenis tindak kejahatan. Tindakan pidanaatau tindakan kriminal memiliki dampak yang sangat merugikan dalam kehidupan sosial di masyarakat Indonesia, sehingga dapat menimbulkan kecemasan, ketakutan, kecemasan, dan kepanikan di kalangan masyarakat Indonesia. Dengan meningkatnya kasus tindak kriminal dan revolusi dunia, khususnya peningkatan tindak kriminal di internet sangat tambah kekhawatiran, penegakan hukum merupakan inti utama dalam melawan tindakan kriminal di internet, sehingga penegakan hukum harus bekerja keras.

Usaha penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, khususnya bagi penegakan dalam bidang hukum pidana.Oleh karena itu, politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (Arief, 2014: 23).Kemudian, dalam rangka membentuk kebijakan hukum pidana tersebut, diperlukan suatu pembaharuan dalam bidang hukum pidana.Terutama di negara Indonesia, penegakan hukum pada kasus cybercrimesangat didorong oleh 5 faktor yaitu undang-undang, budaya, institusi, perilaku masyarakat, dan pemikiran aparat penegak hukum. Hukum tidak dapat ditegakkan dengan sendirinya dan selalu menyertakan manusia dan perilaku manusia, juga tidak dapat dipaksakan tanpa permintaan.

Fenomena berkembangnya bentuk tindak pidana terorisme konvensional menjadi tindak pidana terorisme yang menggunakan internet membuat badan legislatif harus dengan segera membentuk suatu kebijakan hukum pidana mengenai tindak pidana cyber terrorism.Meskipun Indonesia telah memiliki UU ITE yang mengatur tentang kejahatan di bidang komputer namun Undang-Undang tersebut dianggap tidak mampu untuk menanggulangi tindak pidana cyber terrorism.Hal tersebut dikarenakan UU ITE hanya mengarah ke bentuk cyber terrorism, tetapi UU ITE tidak mengatur secara materiil mengenai ketentuan penegakan hukum bagi tindak pidana cyber terrorism. elain bersikap profesional dan berhati-hati dalam penegakan hukum, aparat penegak hukum juga harus berhadapan dengan individu dan kelompok dalam masyarakat yang diduga melakukan tindak pidana (Aryo Wijoseno et al., 2023)

Tindak pidana kejahatan pada teknologi informasi dapat diklasifikasikan sebagai white crime dikarenakan para pelaku kriminal di dunia maya merupakan seseorang yang memahami pemakaian aplikasi internet, atau mahir pada bagian tersebut. Karena tindak kriminal ini kerap dilakukandengan cara transnasional atau secara melewati pemisah antar negara, tindak kriminal dunia maya ini disertai dengan dua kriteria kriminal, diantara lain whitecrimedan transnational crime. Terdapatbeberapa kasus tindak kriminal di internet (cyber crime) yang kerap beraksi di kalangan masyarakat di Indonesia yakni penipuan, judi online, penyebaran berita hoax, cracking, hingga pencurian data pribadi melalui internet (Anugerah & Tantimin, 2022)

Dalam membentuk kebijakan hukum pidana mengenai tindak pidana cyber terrorism, maka harus diperhatikan mengenai perbuatan cyber terrorism yang bagaimana agar dapat dijadikan tindak pidana dan sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku. Hal ini ditujukan agar kebijakan hukum pidana yang baru ini mampu menjangkau delik cyber terrorism di masa depan, sehingga harus dipersiapkan secara matang melalui pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy oriented approach) dan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan nilai (value oriented approach). Aspek keamanan mutlak diperlukan dalam pengaturan sistem jaringan berbasis internet. Sistem tanpa sistem keamanan yang baik seperti mengundang pencuri ke rumah kita dan membiarkan mereka mengambil semua yang kita miliki. Saat membangun sebuah sistem, berbagai kerentanan sering ditemukan di dalam sistem. Namun, itu tidak dianggap sebagai kerentanan keamanan

(hole), sehingga dianggap kecil. Celah keamanan sekecil itu tidak kita ketahui dan digunakan oleh para pelaku kriminal untuk melakukan aksi kejahatan (Aryo Wijoseno et al., 2023)

Jika dilihat berdasarkan penjelasan fenomena yang sudah ada terjadi di kalangan masyarakat Indonesia, maka dapat diambil kesimpulan dari faktor kasus-kasus pencurian Informasi atau data pribadi yang telah terjadi sebagai berikut:43a) Kurangnya kesadaranhukum dikalanganmasyarakat. Kesadaran hukum adalah pengetahuan yang berlandaskan persoalan apa yang harus atau larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungannya dengan aturan dan undang-undang yang berlaku di masyarakat di Indonesia. Saat ini, kesadaran hukum masyarakat terhadap kejahatan dunia maya masih dianggap belum memadai karena kurangnya pemahaman tentang kejahatan dunia maya baik dari segi perilaku maupun dampaknya. Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap teknologi dan aktivitas di dunia maya juga berpengaruh penting tentang apa saja aktivitas di dunia maya. Semakin seseorang sedikit pengetahuan tentang teknologi, semakin besar kemungkinannya untuk dieksploitasi oleh para tindak kriminal.Dengan mempelajari cybercrime, masyarakat bertindak dalam pencegahan cybercrime.Tanpa pengetahuan maraknyapelaku penjahat cyber crimedikarenakan masyarakat tidak mengetahui apa yang telah mereka lakukan sampai pada berbagai kerugian yang akan menimpa mereka; b) Keamanan. Sarana yang dipakai oleh penyerang cybercrimeumumnya lain dengan beberapa penjahat lainnya. Para pelaku kejahatan di dunia maya khususnya pencurian informasi atau data pribadi memakai peluang internet yang dapat dipakai dimanapun, seperti di area tertutup maupun terbuka (Megasari Br Nababan et al., 2023)

Tetapi, karena sistem proteksi pada internet masih belum bagus, setiap orang memiliki kebebasan untuk melakukan aktivitas di dunia maya tanpa mengetahui batasan yang bisa berkontribusi pada penyebaran kriminal di dunia maya; c) Aparat Penegak Hukum. Tidak bisa disangkal bahwasanya beberapa aparat penegak hukum mungkin masih tidak mengetahui teknik yang digunakan penjahat untuk melakukan kejahatan dunia maya. Kejahatan dunia maya Penjahat jauh lebih kuat daripada aparat penegak hukum, dan kejahatan dunia maya menjadi lebih intens di Indonesia (Anugerah & Tantimin, 2022)

Cara yang bisa diambil adalah mengoptimalkan peran petugas penegak hukum yang berkualitas dan terstruktur, dengan secara pribadi sekalipun di dalam organisasi, untuk mengkonsolidasikan komunitas yang berdedikasi untuk menangani semua jenis kejahatan dunia maya. Landasan hukum tindakan aparat penegak hukum sudah ada dan kinerja setiap individu dan organisasi harus dioptimalkan. Jika tidak ada penegakan hukum teknologi informasi telah terstruktur dan terorganisir, sulit untuk menangkap para pelaku kejahatan dunia maya, karena TKP kejahatan dunia maya ini dapat bersifat lintas negara; c) Perundang-undangan yang tidak diperbaiki. Sekarang ini Indonesia tidak mempunyai peraturan khusus yang mengendalikan tentang kejahatan dunia maya, tetapi UU pidana dan UU ITE yang semestinya berguna, tetapi peraturan yang ada tidak berlaku. Oleh aparat penegak hukum disebabkan karena minimnya wawasan dan keterampilan di dunia maya (Aryo Wijoseno et al., 2023)

KESIMPULAN

Perbuatan yang berupaya mengakses perangkat digital secara ilegal, seperti halnya komputer bahkan seluruh sistemnya disebut dengan Hacking.Modus operandi kegiatan hacking yaitu dengan memasuki sistem jaringan komputer tanpa persetujuan pemilik dan tanpa otoritas hukum untuk melakukannya.Penegakan hukum terhadap kejahatan dunia maya masih belum mencerminkan penegakan hukum yang efektif.Hambatan yang terdapat dalam mewujudkan penegakan hukum terhadap cybercrimes menjadi tidak ideal karena terdapat kurangnya sarana dan fasilitas yang memadai, diantaranya keahlian dan keteramilan sumber daya manusia dalam bidang teknologi informasi, organisasi yang baik, fasilitas komputerforensik yang layak, dan lain

sebagainya.Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana cyber terorism berdasarkan “hukum positif saat Ini belum diatur secara eksplisit baik dalam KUHP maupun UU khusus di luar KUHP.

Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan “tindak pidana cyber terorism di masa yang akan datang ditinjau melalui kajian perbandingan dan RUU KUHP.Setelah mengetahui bahwa kerusakan pada program dan data komputei disebabkan karena virus komputer yang dengan sengaja dimasukkan kedalam jistem komputer perusahaan.Direktur perusahaan segera melaporkan kepada pihak yang berwajib.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat Nya, saya dapat menyelesaikan artikel ini. Penulisan artikel ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat tugas Metode Penelitian Di Fakultas Hukum, Universitas Wiraraja Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, cukupsulit bagi saya untuk menyelesaikan artikel ini. Sekian dari saya terimakasih

DAFTAR PUSTAKA

Anugerah, F., & Tantimin, T. (2022). Pencurian Data Pribadi Di Internet Dalam Perspektif Kriminologi. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, *8*(1), 419–435. https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.45434

Aryo Wijoseno, B., Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, I., Kunci, K., Hukum, K., Pidana, T., & Dunia Maya, K. (2023). Jerat Pidana Terhadap Pelaku Peretas Sistem Komputer Secara Ilegal (Hacker) Dalam Perpsektif Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Kertha Desa*, *11*(3), 2031–2041.

Megasari Br Nababan, D., Lasmadi, S., & Erwin, E. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Tindak Pidana Dunia Maya. *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, *4*(27), 2721–8325.